

# **DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

**Muhammad Rizki**  
**Politeknik STIA LAN Jakarta**  
muhammadrizki@stialan.ac.id

## ***Abstract***

*Indonesia's poverty rate in the 2012-2019 period experienced a downward trend. In December 2019, the corona virus was discovered in humans and caused the disease Covid-19 to spread throughout the world. Indonesia then implemented a large-scale social restriction (PSBB) policy in an effort to prevent transmission and handle Covid-19. This condition has resulted in the cessation of economic activity in various sectors. The declining national economy will have an impact on increasing unemployment and poverty. The Government's policy carried out in 2020 is to implement the PEN program which is divided into 6 sectors, namely, the health sector, the social protection sector, the sectoral support sector for K/L & Local Government, the business incentive sector, the support sector for MSMEs, and the corporate financing sector. In this study, the author aims to discuss the impact of the PEN program on the social protection sector on poverty based on observations from several sources. The results of the study show that the pandemic handling program has been realized and has an impact, as shown in the at least an increase in the percentage of the poor during the pandemic. However, the government needs to increase the effectiveness of social assistance because it is still very much needed to reduce the burden of spending on households, especially poor households, in the current situation.*

**Keywords:** *government assistance; social protection; poverty*

## **Abstrak**

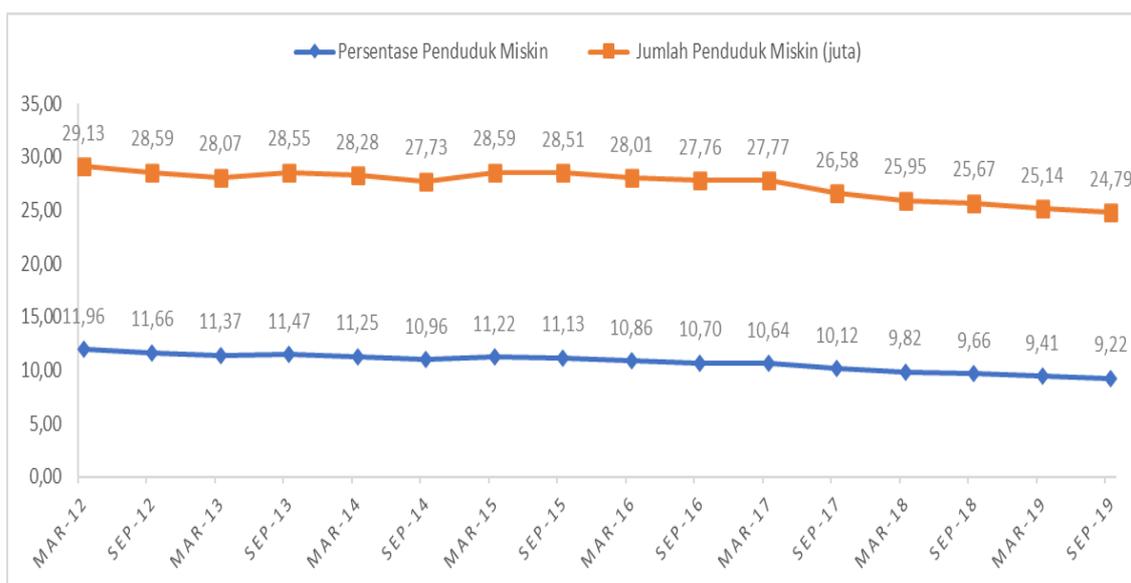
Tingkat kemiskinan Indonesia pada periode 2012-2019 mengalami tren menurun. Pada Desember 2019, corona virus ditemukan pada manusia dan menyebabkan penyakit Covid-19 menyebar ke seluruh dunia. Indonesia kemudian menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka upaya pencegahan penularan dan penanganan Covid-19. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berhentinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Perekonomian nasional yang menurun akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan Pemerintah yang dilakukan pada tahun 2020 adalah menerapkan program PEN terbagi kedalam 6 sektor yaitu, sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor dukungan sektoral K/L & Pemda, sektor insentif usaha, sektor dukungan kepada UMKM, dan sektor pembiayaan korporasi. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk membahas dampak program PEN pada sektor perlindungan sosial terhadap kemiskinan berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa sumber. Hasil peneliitian menunjukkan bahwa program penanganan pandemi telah direalisasikan dan berdampak, ditunjukkan pada sedikitnya jumlah peningkatan persentase penduduk miskin pada masa pandemi. Namun, pemerintah perlu untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial karena masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, dalam situasi saat ini.

**Kata Kunci:** bantuan pemerintah; perlindungan sosial; kemiskinan

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada periode 2012-2019 mengalami tren menurun. Pada September 2012 tingkat kemiskinan sebesar 11.66%, kemudian menurun signifikan sebanyak 20,93% dari tingkat kemiskinan pada

September 2012 menjadi 9,22% pada September 2019. Sementara secara jumlah orang, pada periode yang sama total penduduk miskin berkurang hampir 4 juta jiwa, dari 28,58 juta orang menjadi 24,79 juta orang. Secara spasial, kemiskinan di perdesaan masih mendominasi. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 14,93 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,86 juta orang. Pada periode September 2012 sampai dengan September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan menurun sebanyak 3 juta orang lebih, sementara di daerah perkotaan menurun sekitar 650 ribu orang. Berdasarkan provinsi, Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase penduduk miskin terendah pada September 2019. Namun, persentase penduduk miskin Provinsi Papua telah mengalami penurunan dari 30,66% pada tahun 2012 menjadi 26,55% pada tahun 2019. Penurunan kemiskinan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2012-2019 yang terjaga pada rata-rata di atas 5 persen per tahun. Hal ini bisa dikatakan menunjukkan adanya indikasi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia telah merata. Selain faktor meratanya pertumbuhan ekonomi, bantuan sosial yang telah disalurkan sampai dengan September 2019 juga turut andil terhadap penurunan kemiskinan di seluruh provinsi.



Grafik 1. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2019

Pada Desember 2019, corona virus ditemukan pada manusia di Wuhan China yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menyebar ke seluruh dunia. Upaya pencegahan penularan dan penanganan terus dilakukan oleh seluruh negara di dunia, seperti *travel advice* atau himbauan perjalanan bagi warganya yang akan bepergian, *lockdown* atau menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya, dan lainnya. Indonesia kemudian menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan aturan teknis pelaksanaan PSBB diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan

(Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan PSBB tersebut memuat berbagai pembatasan dan menyebabkan timbulnya istilah seperti *work from home*, dan sekolah *online*. Berbagai upaya pencegahan tersebut berdampak signifikan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

Kondisi seperti ini menimbulkan konsekuensi berhentinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor, tak terkecuali sektor informal. Kinerja ekonomi juga akan menurun tajam karena konsumsi terganggu, dan diiringi investasi yang terhambat, serta adanya kontraksi pada ekspor-impor karena COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Perekonomian nasional yang menurun akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan *extraordinary* agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Kebijakan Pemerintah yang dilakukan pada tahun 2020 adalah menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mencegah agar kondisi sosial, dan ekonomi tidak semakin memburuk. PEN dirancang untuk merevitalisasi perekonomian Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kemiskinan serta mencegah dunia usaha dari kemerosotan.

Program penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN terbagi kedalam 6 sektor yaitu, sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor dukungan sektoral K/L & Pemda, sektor insentif usaha, sektor dukungan kepada UMKM, dan sektor pembiayaan korporasi. Setiap sektor kemudian dirinci lagi ke dalam beberapa program kegiatan yang lebih spesifik. Pada tahun 2020, pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan COVID-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun yang dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp99,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp230,21 triliun, sektoral K/L, dan Pemda sebesar Rp67,86 triliun, UMKM sebesar Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,73 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun (Kementerian Keuangan, 2020a).

Selanjutnya pada tahun 2021, pemerintah juga menganggarkan untuk program yang sama sebesar Rp744,77 triliun. (Kementerian Keuangan, 2021b). Pada tahun 2021, pemerintah berinisiatif untuk melanjutkan jaring pengaman sosial (JPS) dan mengembangkan register sosial dengan cakupan universal seluruh penduduk. Namun JPS pada 2021 akan berbeda dibandingkan 2020. Pemerintah akan melakukan penyesuaian baik dari sisi manfaat maupun cakupan program. Selain itu, pengembangan register sosial nantinya akan mencakup data kondisi sosial ekonomi penduduk yang termutakhirkan secara berkala.

Penelitian tentang dampak program bantuan yang diberikan oleh pemerintah pernah dilakukan oleh Dewi & Andrianus (2021), hasilnya menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperbaiki angka kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. Bantuan sosial (Jaminan Kesehatan Nasional- Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dan Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hubungan yang sangat kuat negatif terhadap jumlah penduduk miskin yang artinya menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat menurunkan jumlah kemiskinan secara signifikan (Lindiasari & Ramadhani, 2019). Belanja Bansos (Bantuan Sosial) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode Januari 2013 hingga 2017 (Mufliha, 2018). Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk membahas dampak program PEN pada sektor perlindungan sosial terhadap kemiskinan berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa sumber.

## **KAJIAN LITERATUR**

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 dan diubah pada PP No. 43 Tahun 2020. Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN dilaksanakan dengan prinsip asas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung Pelaku Usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan *moral hazard* dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Program perlindungan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Peran vital perlindungan sosial tercermin pula dari kebijakan pemerintah atas program PEN, dimana salah satu program PEN yang merupakan program kebijakan komprehensif untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian adalah program perlindungan sosial. Perlindungan sosial mempunyai peranan yang sangat krusial di masa pandemi Covid-19 untuk menjaga tingkat konsumsi terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sektor perlindungan sosial yang digunakan dalam program PEN antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon Listrik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan Perlindungan sosial lainnya. Dari seluruh program perlindungan sosial yang selama ini telah dijalankan, pemerintah memasukkan beberapa di antaranya sebagai bagian dari program PEN. Ada tiga pendekatan yang dilakukan terkait perlindungan sosial selama pandemi, yaitu melanjutkan program yang sudah ada, menyesuaikan manfaat, dan waktu penyaluran dari beberapa program sesuai kebutuhan penanganan pandemi, dan menjalankan program baru. Menyesuaikan waktu dan manfaat dari beberapa program sesuai kebutuhan penanganan pandemik merupakan salah satu elemen penting dari perlindungan sosial.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Namun untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19, pemerintah menaikkan anggaran PKH sebesar 25%, dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM sesuai data yang diterima dari

pemerintah daerah, serta penyaluran yang sebelumnya dilakukan setiap 4 kali dalam setahun diubah menjadi bulanan, mulai April 2020 hingga Desember 2020 (Wahid, 2020).

### **Kartu Sembako**

Kartu Sembako atau yang dulunya merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara nontunai setiap bulan kepada KPM. Kartu Sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Pemerintah menaikkan besaran nilai bantuan yang sebelumnya Rp150.000 naik menjadi Rp200.000 (Nurachman, 2020). Jumlah penerima manfaatnya naik dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM (Wahid, 2020). Bantuan ini diberikan selama sembilan bulan hingga Desember 2020. Selain itu, Bantuan Sosial Uang Tunai disalurkan untuk 9 juta peserta Program Sembako/BPNT yang tidak menerima PKH dengan uang tunai senilai Rp500 ribu/KPM, dan hanya diberikan sekali (Setiawan, 2020).

### **Paket Sembako Jabodetabek**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial menyalurkan sebanyak 1,3 juta paket sembako bagi warga DKI Jakarta dan 600 ribu paket sembako bagi warga Bodetabek yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak menerima PKH dan Kartu Sembako sebagai suatu upaya menangani dampak COVID-19. Bantuan sosial yang berupa paket sembako ini dijadwalkan akan disalurkan pada April sampai Juni 2020 dengan besaran Rp. 300.000,-/paket yang diberikan sebanyak 2x dalam sebulan sehingga totalnya menjadi Rp. 600.000,-/bulan. Namun pada periode Juli-Desember 2020 menjadi Rp300 ribu ribu/KPM/bulan.

### **Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek**

Bantuan sosial tunai non-Jabodetabek diberikan untuk 9,2 juta KPM di luar Jabodetabek yang tercatat dalam DTKS, dan tidak menerima PKH dan Kartu Sembako. Nilai bantuan sebesar Rp600 ribu/KPM/bulan pada periode April-Juni 2020, dan Rp300 ribu/KPM/bulan pada periode Juli-Desember 2020 dalam bentuk tunai.

### **Kartu Prakerja**

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun yang mana meningkat sebanyak dua kali lipat dari rencana awal sebesar Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik (Fauzia, 2020). Pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dengan cuti tak dibayar (*unpaid leave*), pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19 diharapkan dapat menerima manfaat dari program kartu prakerja. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei evaluasi Kartu Prakerja sebesar Rp150 ribu untuk 3 kali survei. Biaya pelatihan diberikan kepada peserta program prakerja untuk dapat mengikuti pelatihan yang meliputi pembekalan, peningkatan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan atau alih kompetensi kerja, yang diselenggarakan secara daring (*online*) dan/atau luring (*offline*) oleh lembaga pelatihan yang memiliki kerja sama dengan *platform digital*, berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus dan mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana. Insentif pasca pelatihan diberikan untuk

meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup, dan pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

### **Diskon Listrik**

Diskon listrik merupakan bantuan untuk pelanggan PLN yang diberikan dalam bentuk pembebasan dan diskon biaya listrik pasca bayar dan Prabayar. Bantuan tersebut diberikan selama periode April hingga Desember 2020 untuk pelanggan listrik 450 Volt Ampere (VA) dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA. Bagi pelanggan rumah tangga, program ini memberikan diskon 100% kepada pelanggan listrik kategori daya 450 VA dan diskon 50% kepada pelanggan kategori daya 900VA bersubsidi yang sudah terdata dalam DTKS di Kementerian Sosial. Demikian juga untuk pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA akan diberikan diskon 100% tagihan listrik. Bantuan untuk pelanggan pasca bayar akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan, sementara untuk pelanggan pra bayar akan diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir (PLN, 2020).

### **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)**

BLT-DD merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti PKH, BPNT dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis studi korelasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2019). Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

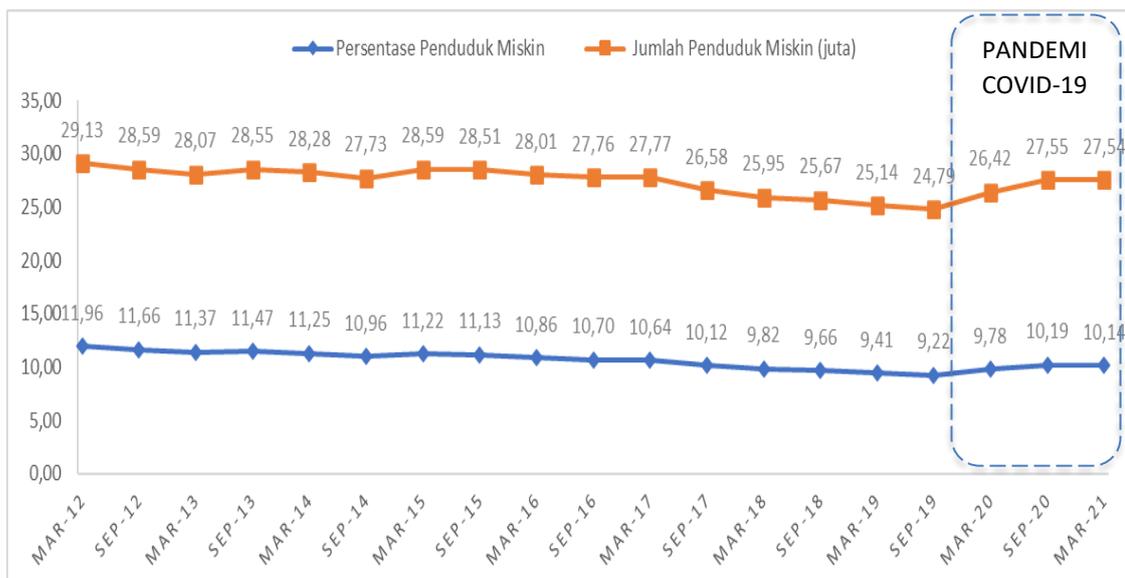
Pada pertengahan Juli tahun 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi program Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN pada tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun yang merupakan 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi program Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN terdiri dari sektor perlindungan sosial sebesar Rp216,6 triliun, sektor dukungan UMKM sebesar Rp112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,2 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp62,6 triliun, sektor pembiayaan korporasi sebesar Rp60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun (Kementerian Keuangan, 2020b). Realisasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar 94% dari total anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan

sosial sebesar Rp230,21 triliun. Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 2,2 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM, Bantuan Subsidi Gaji/Upah kepada 12,4 juta karyawan, 2,0 juta guru honorer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 619 ribu guru honorer Kementerian Agama, dan Kartu Prakerja kepada 5,5 juta penerima serta diskon tarif listrik kepada 32,1 juta rumah tangga penerima.

Pemerintah terus mengoptimalkan instrumen APBN melalui berbagai belanja pemerintah untuk menjaga konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan sehingga diharapkan dapat mengerem laju peningkatan kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke zona positif. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Program (UNDP), Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA), dan SMERU Research Institute, lebih dari 85% rumah tangga yang disurvei di Indonesia telah menerima sedikitnya satu bentuk bantuan sosial pemerintah dari Program PEN. Hasil survei menunjukkan setengah (50,8%) dari rumah tangga di Indonesia telah menerima bantuan tunai, dan sebagian besar penerima bantuan adalah rumah tangga termiskin (UNICEF et al., 2021). Tanpa paket Bantuan Darurat Pemerintah yang diimplementasikan secara penuh, guncangan ekonomi akibat COVID-19 akan meningkatkan kemiskinan anak secara signifikan pada tahun 2020 (BKF & UNICEF, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramanik (2020) di kota Padalarang, menunjukkan bahwa bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh dalam meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2020, persentase penduduk miskin Indonesia meningkat menjadi sebesar 10,19% atau sebanyak 27,55 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Namun, jika pemerintah tidak menetapkan kebijakan program perlindungan sosial (perlinsos) maka diyakini tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 17,15% (Susanto, 2021). Menkeu mengatakan bahwa perlinsos dalam PEN telah berhasil menahan kenaikan tingkat kemiskinan di level 10,19%, sehingga tidak mencapai proyeksi dari Bank Dunia yang mencapai 11,2% (Kementerian Keuangan, 2021a).

Pemerintah terus bekerja keras mengupayakan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dengan beberapa kebijakan terkait perlindungan sosial. Peningkatan tingkat konsumsi dan daya beli terutama masyarakat miskin dan rentan, selain diwujudkan melalui pemberian berbagai program perlindungan sosial, antara lain bantuan sosial, subsidi, dan berbagai kebijakan lainnya, pemerintah juga tetap berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga mampu memberikan dorongan dari sisi permintaan yang masih belum pulih akibat pandemi Covid-19. Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 tingkat penduduk miskin sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin (BPS, 2021). Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini menurun 0,05% atau 0,01 juta orang dari September 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.



Grafik 2. Presentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2021

Realisasi anggaran dari Program PEN baru mencapai 54,3 persen atau setara Rp404,70 triliun dari pagu anggaran Rp744,77 triliun hingga 24 September 2021. PEN untuk perlindungan sosial tercatat baru terealisasi sebesar 62,2 persen atau setara Rp116,02 triliun dari total pagu Rp186,64 triliun. Realisasi dari pagu perlindungan sosial juga mencakup pembiayaan program keluarga harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu sembako untuk 17 juta KPM. Adapun realisasi ini juga mencakup bantuan sosial tunai (BST) 10 juta KPM dan BLT desa untuk 5,62 juta KPM. Adapun realisasi dari kartu pra kerja yang sudah mencapai 5,22 juta orang, bantuan kuota internet untuk 36,1 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 4,61 juta pekerja dan bantuan beras untuk 28,8 juta KPM (Jannah, 2021).

Pada triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7,07% (yoy), tertinggi dalam 16 tahun terakhir (Moegiarso, 2021). Salah satu strategi yang cukup berhasil mendongkrak pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Program PEN di tahun 2021 tetap fokus mendukung sisi permintaan maupun dari sisi sektor produksi, seperti meningkatkan bansos, serta pelaksanaan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat membantu sektor usaha, seperti UMKM. Kucuran bansos dari pemerintah, mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan. Kembalinya aktivitas masyarakat dapat menjaga momentum pemulihan sekaligus mengakselerasi program PEN.

Skema kebijakan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat khususnya pada kondisi miskin dan rentan terus diperluas. Beberapa diantaranya adalah kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga pada bulan Juli dan Agustus dibayarkan dua kali, diskon listrik untuk 32,6 juta rumah tangga dan subsidi kuota internet untuk 36,1 juta penerima diperpanjang hingga Desember 2021. Selain fokus dalam upaya pengendalian Covid-19 dengan akselerasi vaksinasi, pemerintah juga fokus dalam upaya melindungi masyarakat

rentan, dan membantu pelaku usaha melalui berbagai program perlintsos, serta meningkatkan daya saing.

## **PENUTUP**

Program penanganan pandemi telah direalisasikan dan berdampak, ditunjukkan pada sedikitnya jumlah peningkatan persentase penduduk miskin pada masa pandemi. Namun, pemerintah perlu untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial karena masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, dalam situasi saat ini. Pemerintah dapat memperluas cakupan program-program perlindungan sosial yang telah ada, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang belum termasuk dalam bantuan sosial bentuk apa pun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Program (UNDP), Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA), dan SMERU Research Institute, sekitar 15% rumah tangga yang disurvei di Indonesia belum menerima satu bentuk bantuan sosial pemerintah mana pun. Perbaikan basis data rumah tangga miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi menjadi penting karena basis data yang baik akan menentukan tepat sasaran atau tidaknya sebuah program bantuan sosial pemerintah nantinya. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program bantuan sosial tersalurkan secara tepat waktu. Ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan menjadi kunci efektivitas program dalam menanggulangi penurunan kemiskinan.

Penambahan nilai bantuan juga diperlukan untuk rumah tangga miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi. Misalnya, nilai bantuan dapat diperbesar dari Rp300.000 per bulan per rumah tangga menjadi Rp600.000 per bulan per rumah tangga seperti pada awal tahun 2020. Angka nominal ini juga dinilai kurang memadai mengingat beban rumah tangga makin berat selama krisis berkepanjangan akibat pandemi. Sebagai perbandingan, secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp2.121.637,00/rumah tangga miskin/bulan. Salah satu cara untuk menambah nilai bantuan, seperti mengkombinasikan satu program dengan program lain, saling melengkapi untuk memperbesar manfaat program terhadap pengeluaran rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BKF, & UNICEF. (2020). *Ringkasan Kebijakan Dampak COVID-19 terhadap Kemiskinan dan Mobilitas Anak di Indonesia*. 1–16. Diambil dari [https://www.unicef.org/indonesia/media/8461/file/Dampak COVID-19 terhadap kemiskinan dan mobilitas anak di Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/8461/file/Dampak_COVID-19_terhadap_kemiskinan_dan_mobilitas_anak_di_Indonesia.pdf)
- BPS. (2021). Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen. Diambil 28 September 2021, dari Berita Statistik website: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai

- (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu*, 15(2), 77–84.
- Fauzia, M. (2020). Kartu Prakerja, Penyelamat atau Sekadar Pemborosan Anggaran? Diambil dari Kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2020/04/20/073400926/kartu-prakerja-penyelamat-atau-sekadar-pemborosan-anggaran-?page=all>
- Jannah, S. M. (2021). Realisasi Dana PEN Capai Rp404,70 Triliun Hingga 24 September 2021. Diambil 30 September 2021, dari <https://tirto.id/realisasi-dana-pen-capai-rp40470-triliun-hingga-24-september-2021-gjYk>
- Kementerian Keuangan. (2020a). APBN Kita Desember 2020. In *APBN Kita Desember*.
- Kementerian Keuangan. (2020b). Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN Mulai Dimonitor. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-anggaran-penanganan-covid-19-dan-pen-mulai-dimonitor/>
- Kementerian Keuangan. (2021a). Menkeu: Program Perlinsos Berhasil Menahan Tingkat Kemiskinan. Diambil 30 September 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-program-perlinsos-berhasil-menahan-tingkat-kemiskinan/>
- Kementerian Keuangan. (2021b). Realisasi PEN 2021 Capai Rp326,74 Triliun. Diambil 28 September 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pen-2021-capai-rp326-74-triliun/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. In *Buku Saku*.
- Lindiasari, P., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non- Parametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 10–34.
- Moegiarso, S. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Menembus Zona Ekspansif. Diambil 30 September 2021, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3196/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2021-menembus-zona-ekspansif>
- Mufliha, N. M. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2013–2017. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1–128.
- Nurachman, A. (2020). Per Bulan Maret, Nilai Bantuan Program Sembako Naik Jadi Rp. 200.000. Diambil dari Kementerian Sosial website: <https://kemensos.go.id/per-bulan-maret-nilai-bantuan-program-sembako-naik-jadi-rp200000>
- PLN. (2020). Pembebasan Tagihan dan Diskon Listrik Bertahap Mulai Hari Ini. Diambil dari Siaran Pers PLN website: <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2020/04/pembebasan-tagihan-dan-diskon-listrik-bertahap-mulai-hari-ini>

- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 01(12), 113–120. Diambil dari <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209/149>
- Setiawan, K. (2020). Kemensos Salurkan Bansos Uang Tunai untuk 9 Juta KPM. Diambil dari Kementerian Sosial website: <https://kemensos.go.id/kemensos-salurkan-bansos-uang-tunai-untuk-9-juta-kpm>
- Susanto, V. Y. (2021). Angka kemiskinan bisa meningkat jadi 17,15% kalau tak ada program perlindungan sosial. Diambil 28 September 2021, dari Kontan website: <https://newssetup.kontan.co.id/news/angka-kemiskinan-bisa-meningkat-jadi-1715-kalau-tak-ada-program-perindungan-sosial?page=all>
- UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU. (2021). Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia. *Jakarta*.
- Wahid, A. B. (2020). Pandemi Corona, Anggaran PKH Dinaikkan 25% dan Bisa Dicairkan Tiap Bulan. Diambil dari detikNews website: <https://news.detik.com/berita/d-4969767/pandemi-corona-anggaran-pkh-dinaikkan-25-dan-bisa-dicairkan-tiap-bulan>